



UPAH MINIMUM: TEORI & IMPLEMENTASI KEBIJAKANYA DALAM PP 51 TH 2023

(SUDUT PANDANG AKADEMIK)

MOHAMMAD DOKHI, PH.D

POLITEKNIK STATISTIKA STIS - JAKARTA

Content



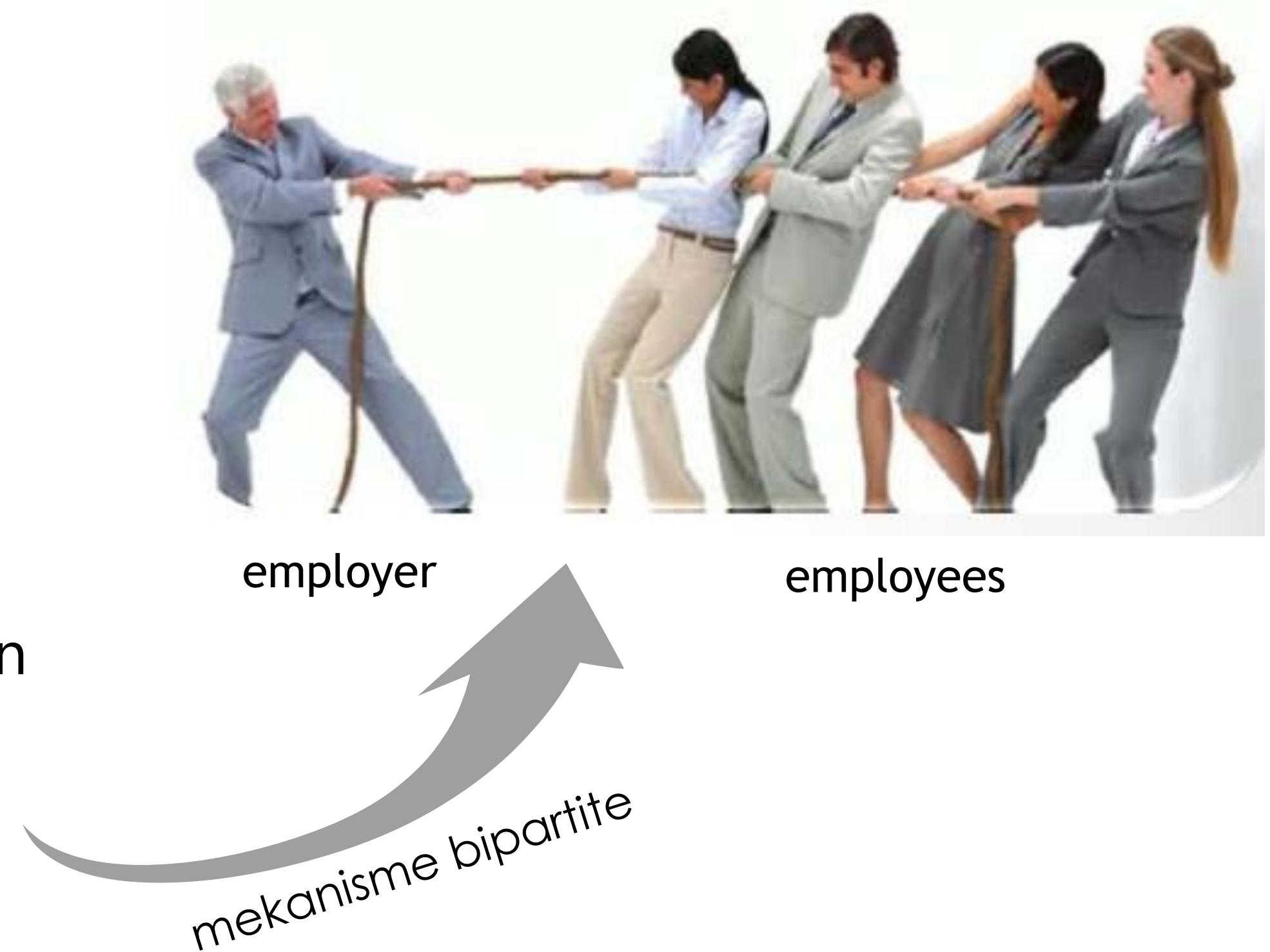
- Teori Tentang Upah Minimum
- Kebijakan dan Kondisi UM di Indonesia Sebelum UU No 6 / Th 2023
- Amanat UU No 6 Th 2023 Tentang UM & Implementasinya Dalam PP 51 Th 2023

1. TEORI TENTANG UM

UPAH & UPAH MINIMUM

Upah adalah hak pekerja/karyawan yang diterima sebagai imbal jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan

- *Issue* ter-sexy dalam hubungan industrial
- Mekanisme upah merupakan bagian dari tindakan ekonomi artinya, para pelakunya akan menerapkan “prinsip ekonomi”
- Nominal rupiah hasil kesepakatan (hasil tawar menawar) antara pemberi kerja dengan penerima kerja

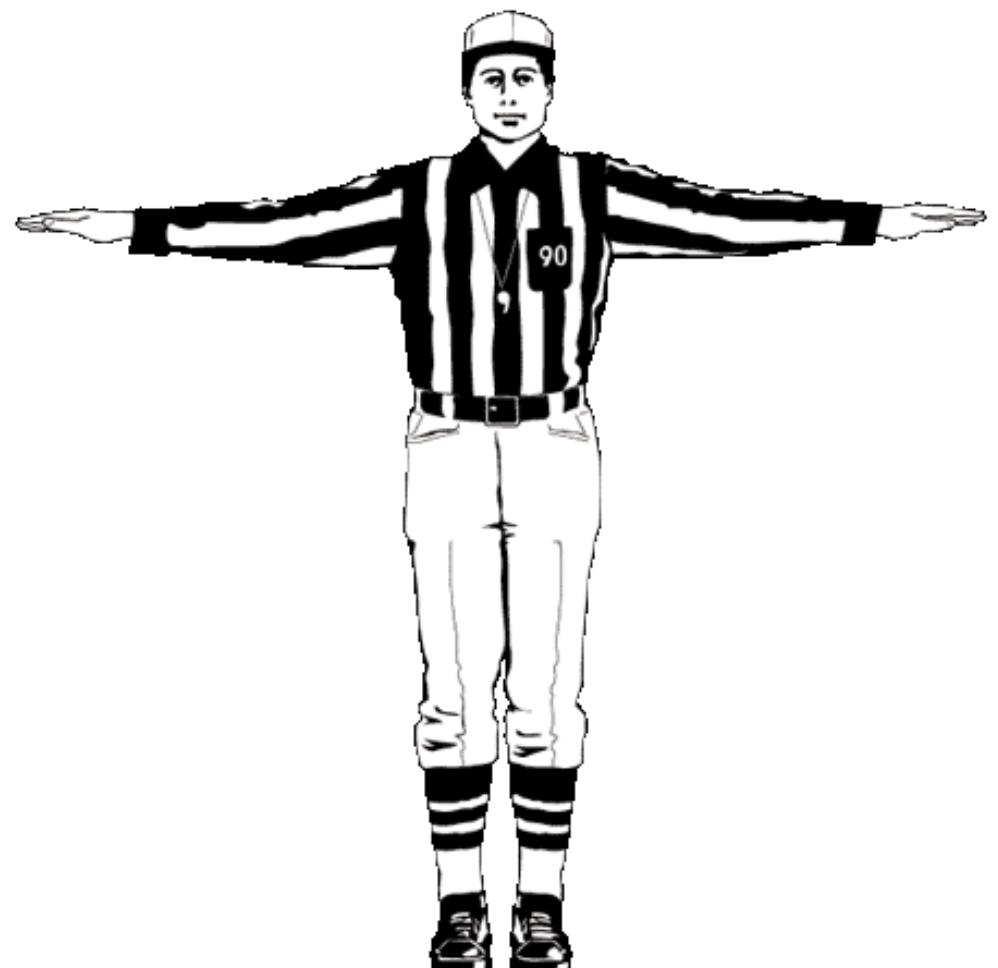


UPAH MINIMUM ≠ UPAH

Peran ganda pemerintah



Melindungi pekerja
(Tidak dibayar terlalu murah)



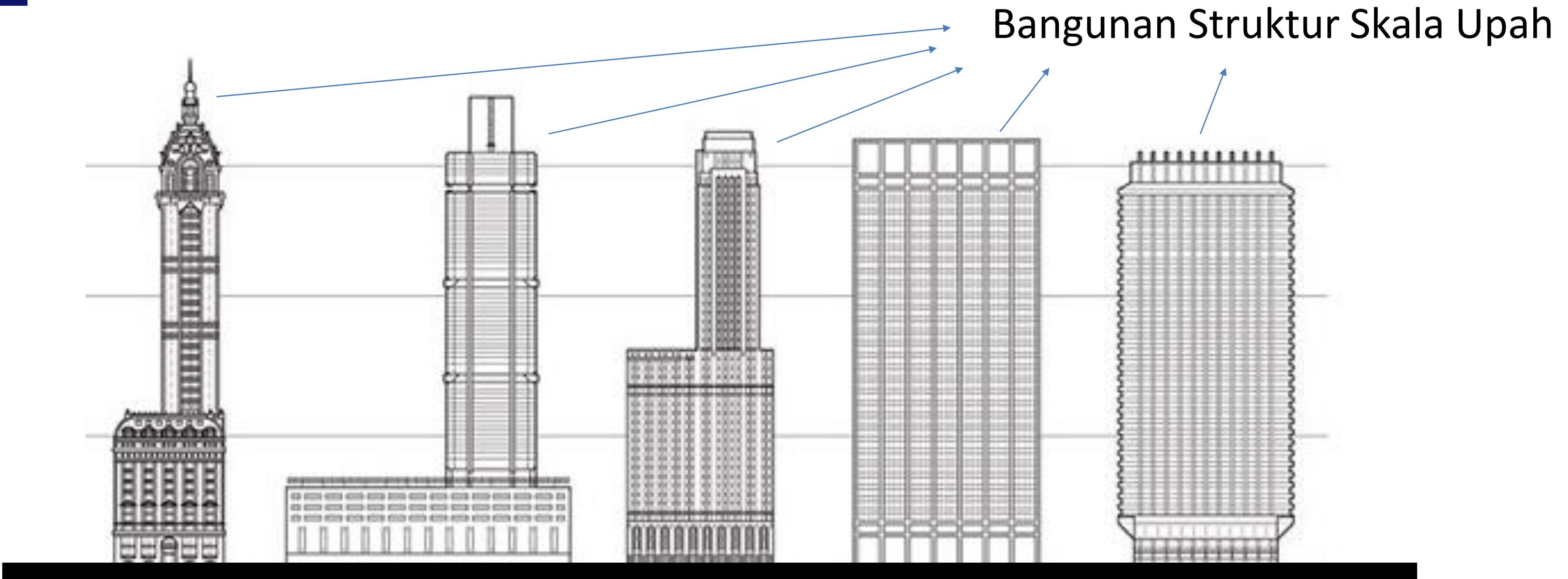
Melindungi Pengusaha
(menjaga daya saing dunia usaha)



Penetapan “Upah Minimum”
(*Threshold* atau batas bawah dari upah di suatu wilayah)

- **UM ≠ Upah**
(*macro vs. micro*)
(*tripartite vs. bipartite*)
- Dalam hal besaran upah, wewenang pemerintah sebatas penetapan nilai UM
- Dalam hal upah aktual (upah kesejahteraan/upah layak) pemerintah hanya menentukan *rule of thumb* nya saja

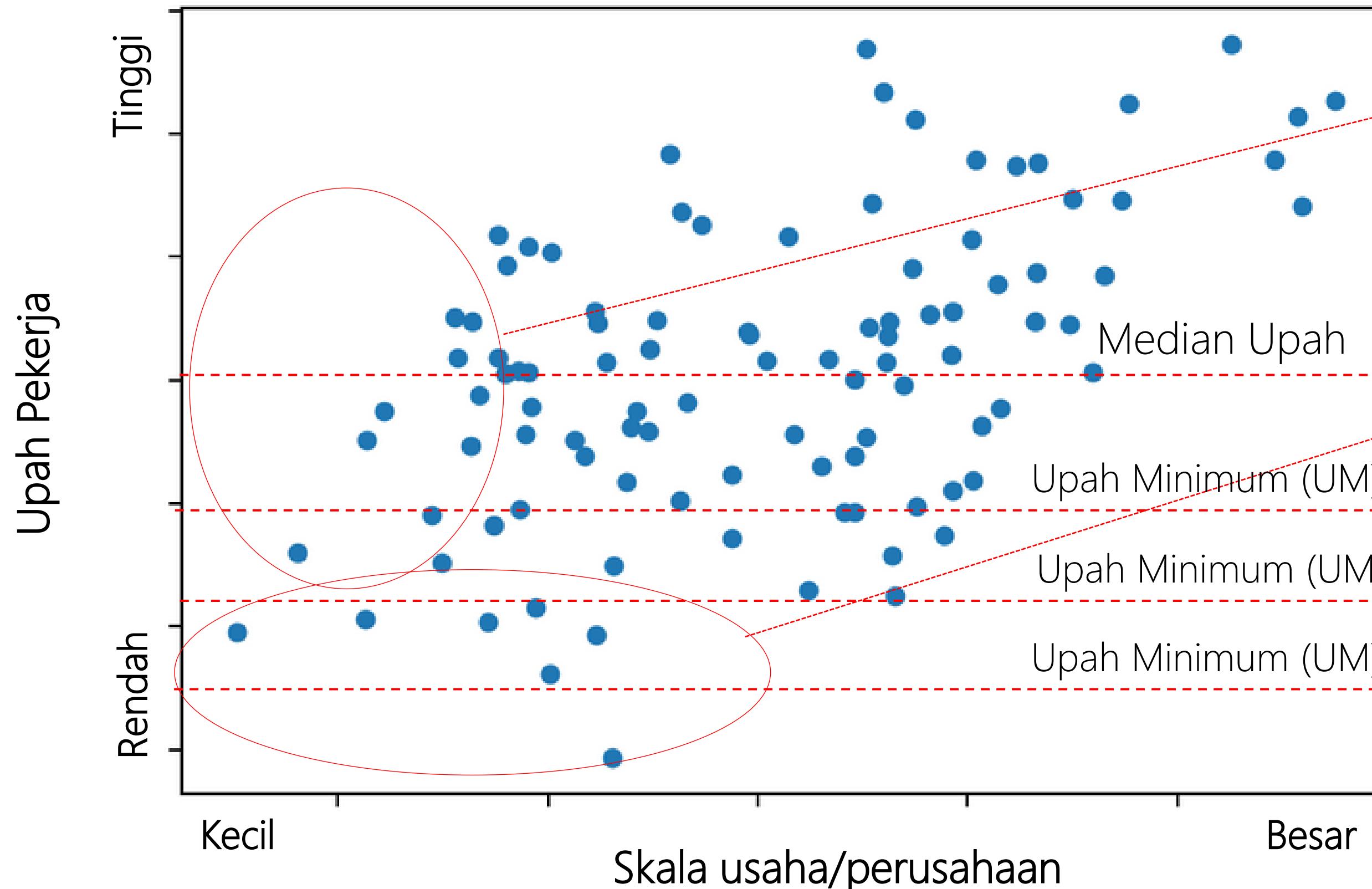
UM ≈ PONDASI UPAH



Upah Minimum sebagai pondasi
upah yang di-upgrade oleh
pemerintah secara berkala

ILUSTRASI UPAH & UM

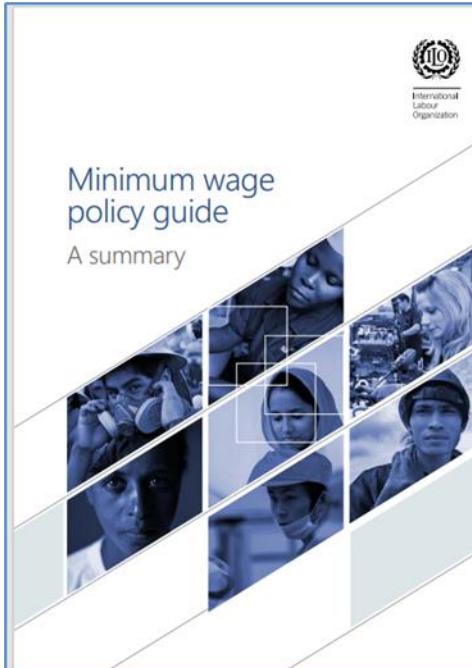
Sebaran upah di suatu wilayah



Perusahaan² yang perlu mendapat reward dari pemerintah

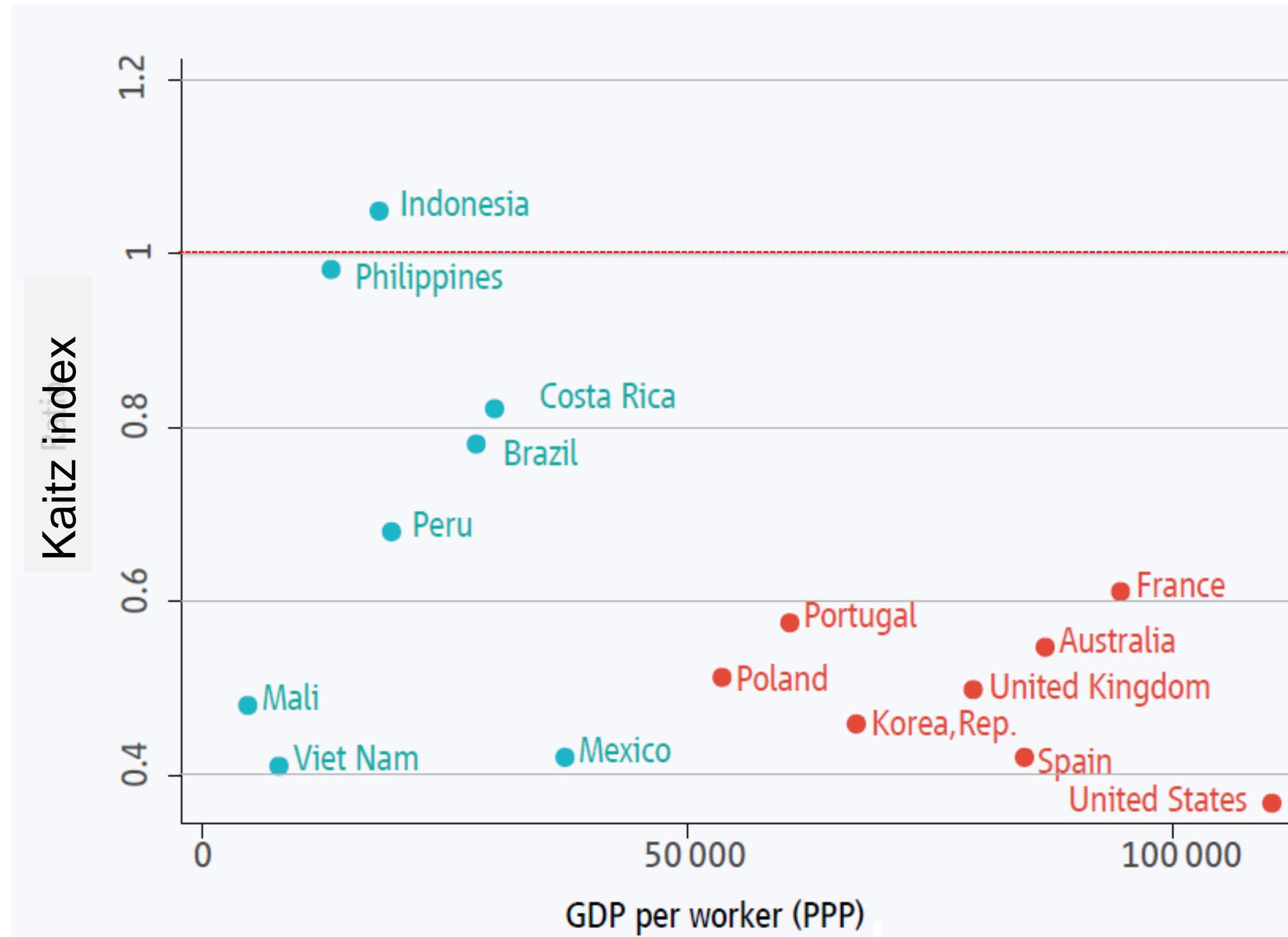
Perusahaan² yang perlu "diintervensi" oleh pemerintah

$$\text{Kaitz Index} = \frac{\text{UM}}{\text{Median Upah}}$$



UPAH MINIMUM & KAITZ INDEX

Figure 1. Ratio of minimum wage to median wages and productivity in selected countries



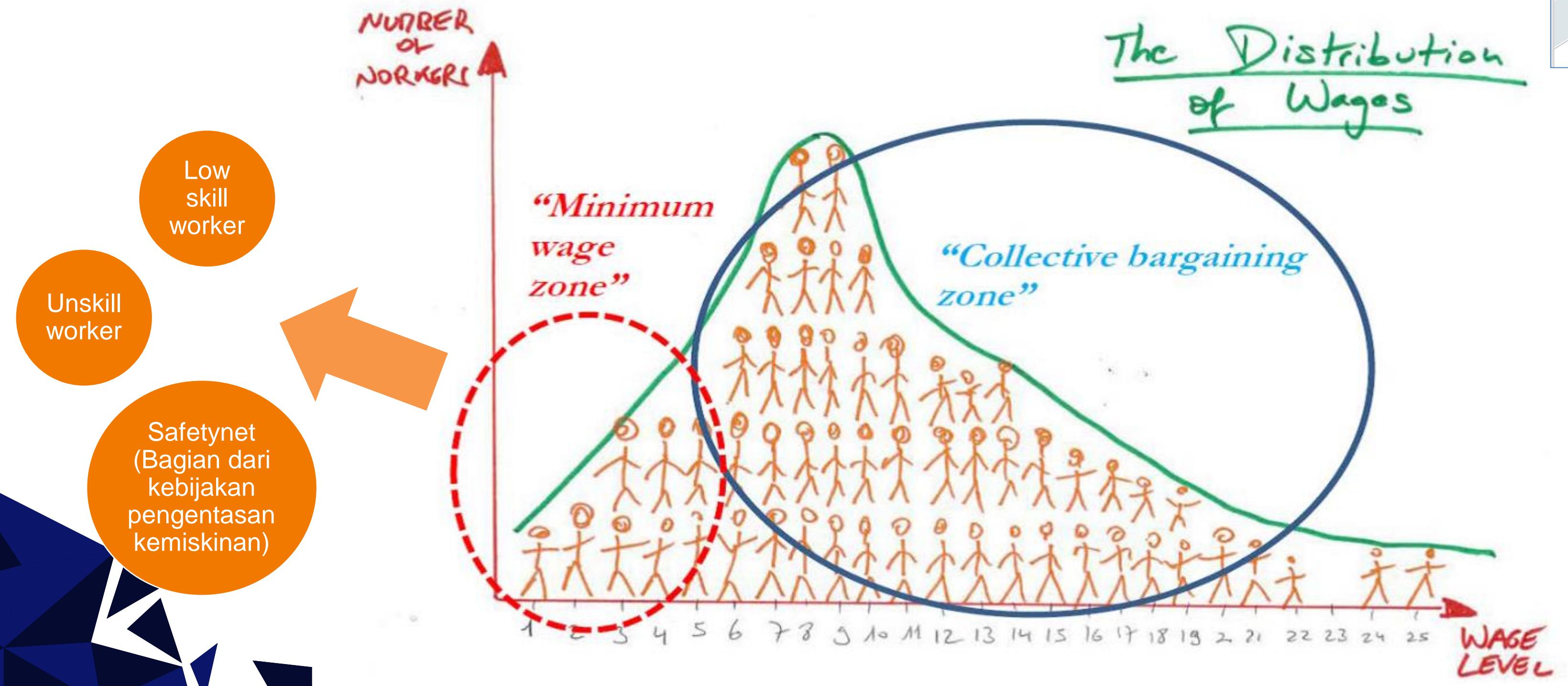
$$\text{Kaitz Index} = \frac{UM}{\text{Median Upah}}$$

- ✓ Ideal Kaitz Index: 0.4 ~ 0.6 (High income country)
- ✓ Indonesia satu²nya negara dengan Kaitz Index > 1



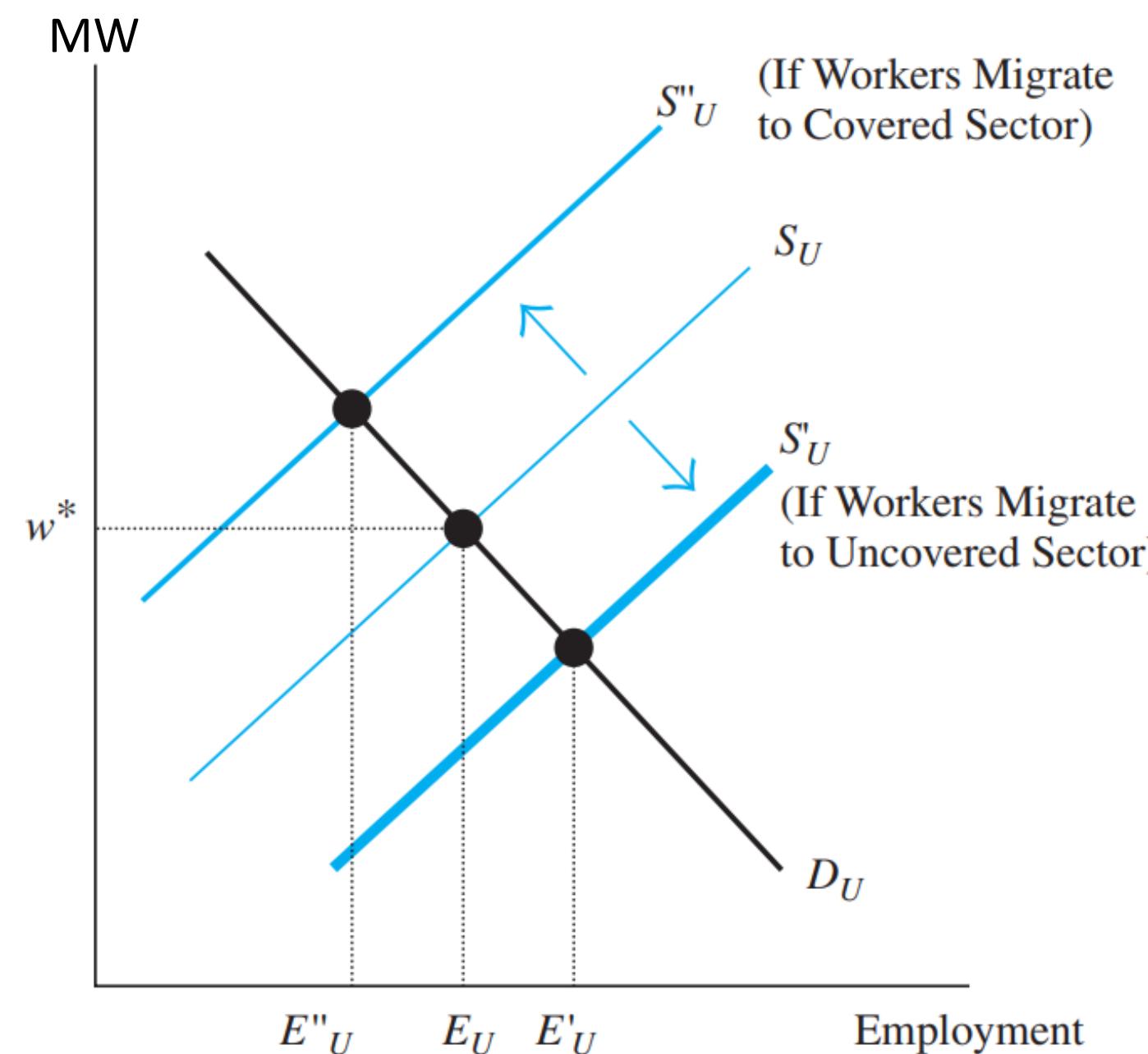
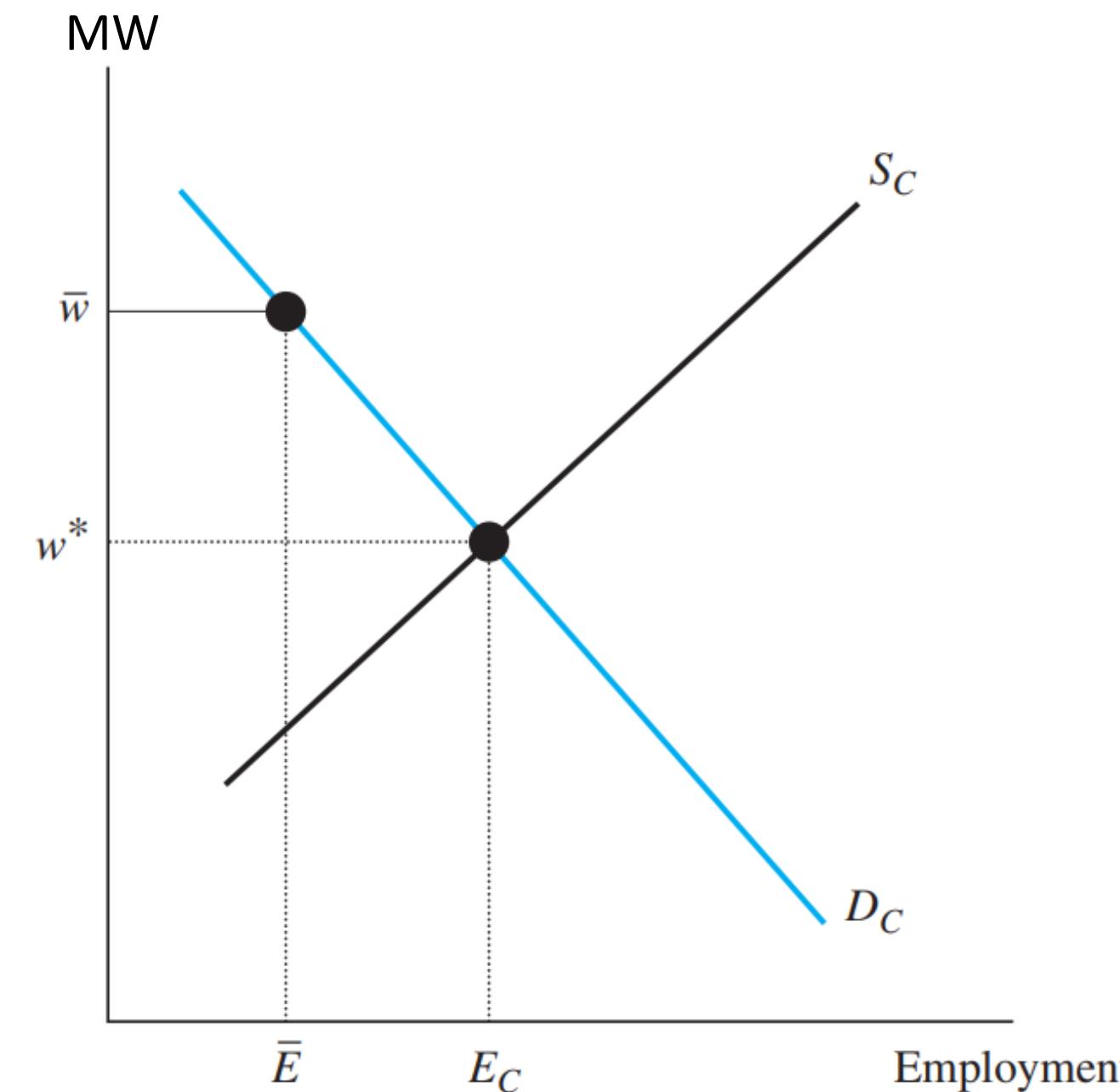
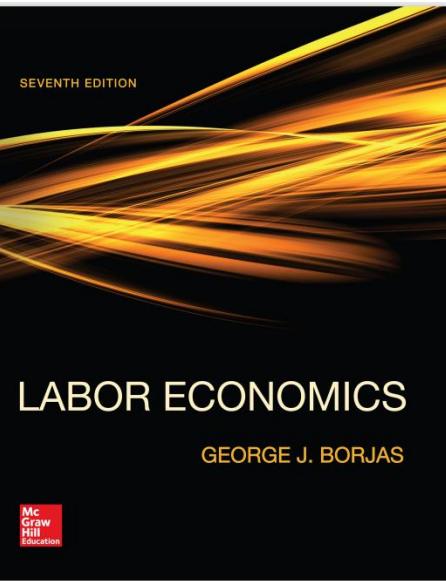
ATTENTION

UNTUK SIAPA UM DITETAPKAN?



Source : Minimum Wage Policy Guide; (ILO)

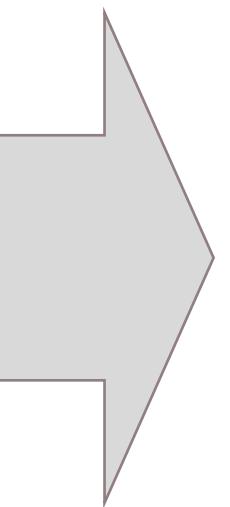
UM & EMPLOYMENT



- Dampak kenaikan UM:**
- Penurunan employment pada sektor formal
 - Menekan upah pada sektor informal
 - Pemicu perusahaan pull-out ke wilayah/negara lain
 - Pemicu inflasi
 - Menurunkan angka kemiskinan

GOAL KEBIJAKAN PENGUPAHAN

Kebijakan pengupahan di negara mana pun harus masuk akal dan rasional dari sudut pandang ekonomi dan sosial

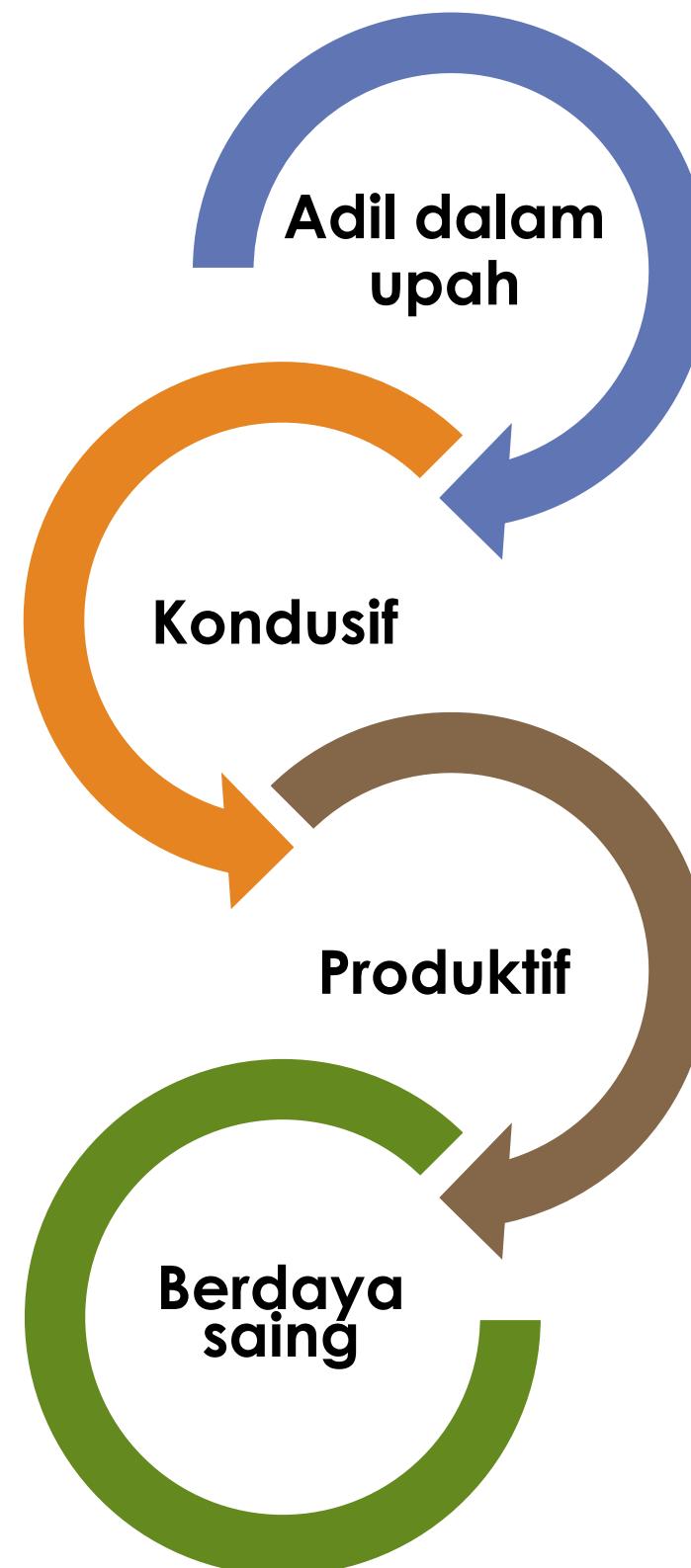


Goal:
Menciptakan daya saing
perekonomian suatu
wilayah/negara

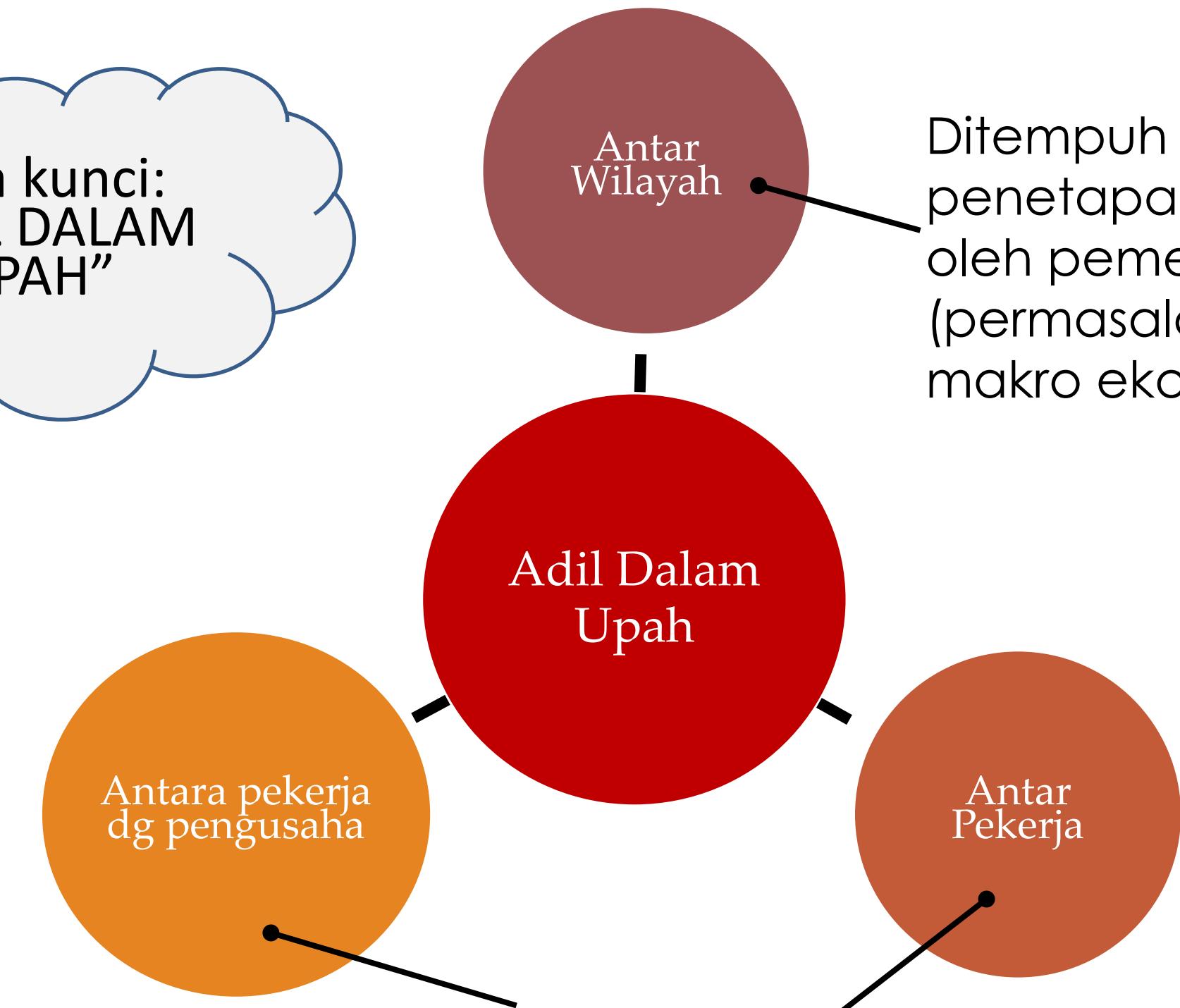
Kriteria kebijakan pengupahan yang ideal

- 1) Mampu menciptakan kondusivitas dunia usaha
- 2) Memuaskan baik pengusaha maupun pekerja
- 3) Mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi

KATA KUNCI PENCAPAIAN GOAL



Kata kunci:
“ADIL DALAM
UPAH”



Ditempuh melalui **Upah** yang dirundingkan secara bipartite (permasalahan mikro ekonomi)

Ditempuh melalui penetapan **UM** oleh pemerintah (permasalahan makro ekonomi)

KRITERIA PENETAPAN UM

SETTING AND ADJUSTING THE LEVEL SHOULD BE THE RESULT OF EVIDENCE-BASED SOCIAL DIALOGUE

CRITERIA



Needs of workers and their families



Economic factors

SETTING AND ADJUSTING THE LEVEL SHOULD BE THE RESULT OF EVIDENCE-BASED SOCIAL DIALOGUE

KEY STATISTICS



Cost of basic needs



Price inflation



Labour productivity



Employment

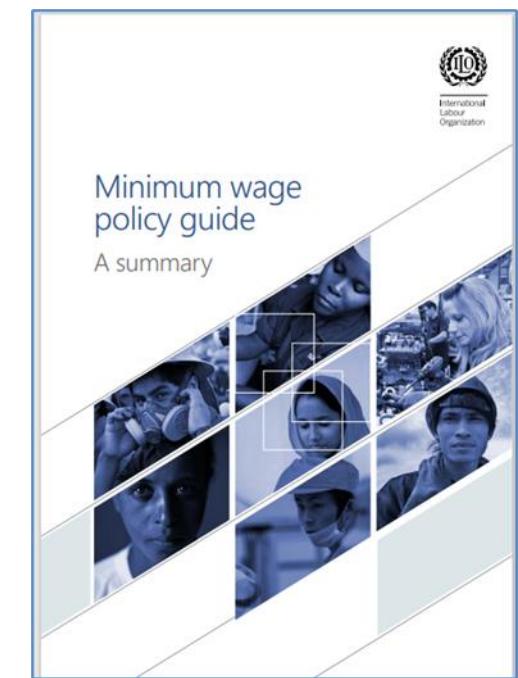


Average wages

dialog sosial berbasis bukti empirik perlu menjadi pertimbangan dalam penetapan UM



ATTENTION



FORMULA PENYESUAIAN UM DI BEBERAPA NEGARA

- BRAZIL

$$\Delta MW_t = \Delta CPI_{t-1} + \Delta GDP_{t-2}$$

- COSTARICA

$$\Delta MW = \text{expected } \Delta CPI \text{ (+correction factor)} + (20\%-40\%) * \Delta GDP \text{ per capita}$$

- MALAYSIA

$$MW_i = Avg \left(\frac{PLI_i}{Avg \text{ workers per household}} + Median wage_i \right) X \left[1 + \left(\frac{P_i}{100} \right) + \left(\frac{CPI_i}{100} \right) - \left(\frac{UE_i}{100} \right) \right]$$

MW = Minimum Wages (RM)

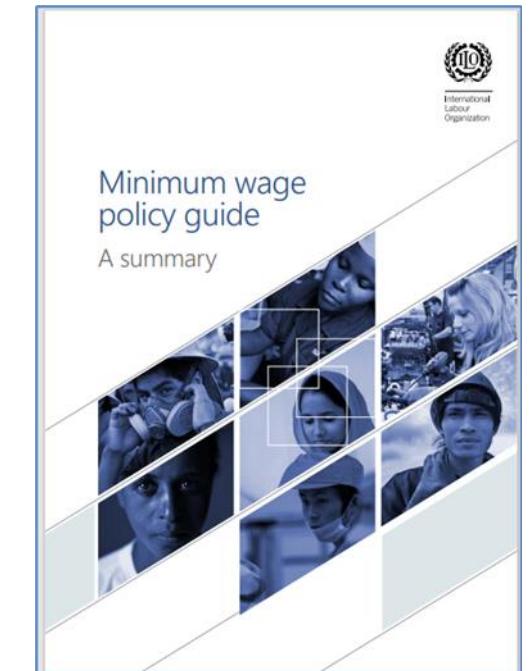
PLI = Poverty Line Income (RM)

P = Productivity growth (%)

CPI = Consumer Price Index (% change)

UE = Real Unemployment Rate (%) = (Unemployment rate – 4%)

i = Region (Peninsular Malaysia, Sabah and Sarawak)



MENGAPA INFLASI & PERTUMBUHAN EKONOMI PENTING

Inflasi:

%tase kenaikan harga barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi oleh masyarakat di suatu wilayah/negara

Inflasi mengukur kenaikan biaya hidup yang harus ditanggung oleh pekerja tahun pertama bekerja

Pertumbuhan ekonomi (PE):

%tase kenaikan total nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah/negara yang tidak dipengaruhi oleh inflasi (tidak mengandung inflasi)

PE mengukur pertumbuhan nilai tambah riil dunia usaha (perkembangan dunia usaha)



2. KEBIJAKAN & KONDISI UU DI INDONESIA SEBELUM UU NO 6 TH 2023

HISTORI PENETAPAN UM & KESENJANGAN UM

2004 ~ 2015
UU NO 13 / 2003

Berdasarkan hasil
survey harga KHL,
dilakukan negosiasi
tripartit

2016 ~ 2020
PP 78 /2015

Menggunakan
formula matematik
dg indicator **inflasi**
**dan Pertumbuhan
Ekonomi**

2021 ~ 2022
UU 11/2020

Menggunakan
formula matematik
dg indicator **inflasi**
**atau Pertumbuhan
Ekonomi**

Terjadi kesenjangan
UM antar wilayah

Kelebihan/
Kelemahan

Kelebihan/
Kelemahan

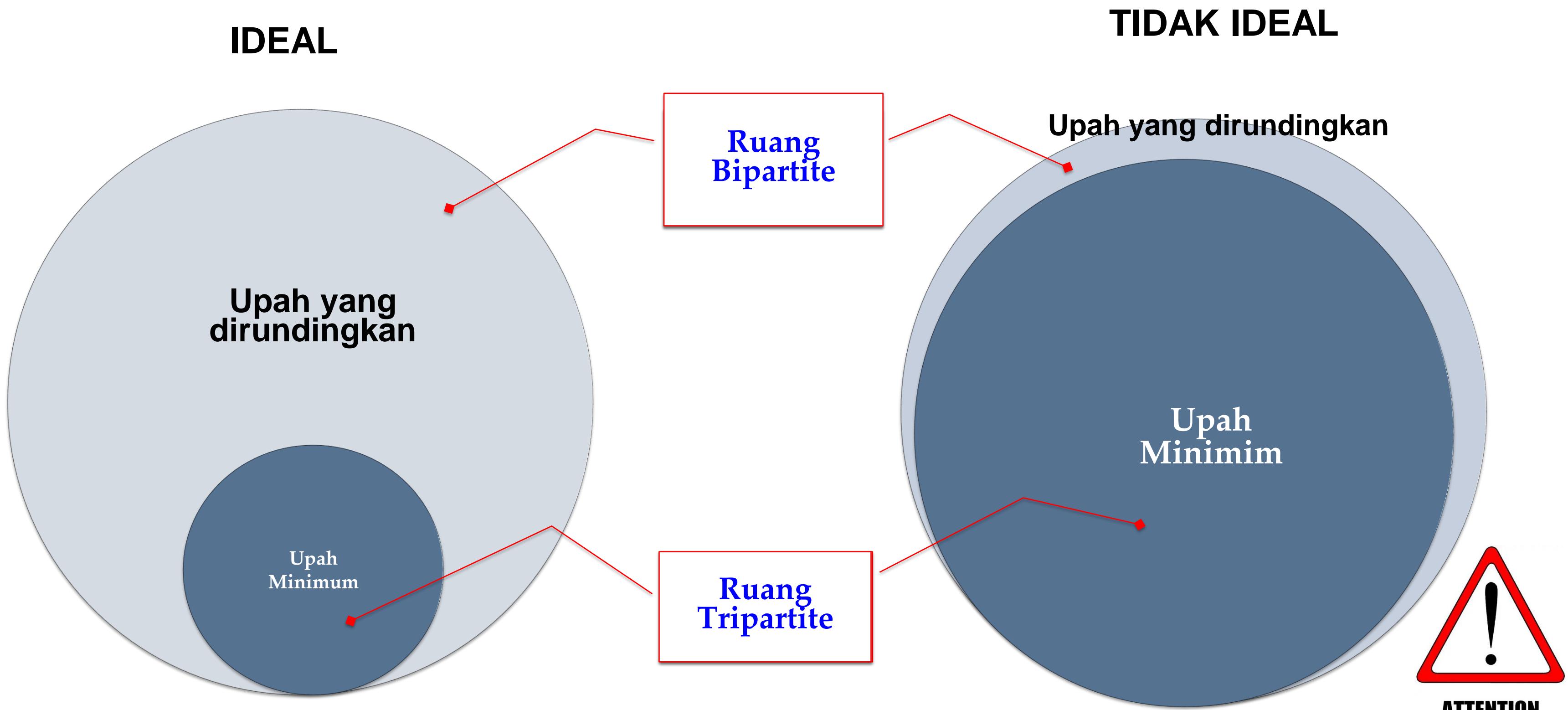
Kelebihan/
Kelemahan

Kesenjangan UM antar
wilayah perlu menjadi
pertimbangan dalam
formulasi UM kedepan



ATTENTION

KONDISI KURANG IDEAL



FORMULA PENYESUAIAN UM DARI WAKTU KE WAKTU: PP 78/2015

$$UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + \{(\%Inflasi + \%PE) \times UM_{(t)}\}$$

Menggunakan inflasi nasional

Menggunakan pertumbuhan ekonomi nasional

Kelebihan:

- *Predictable* dibanding metode sebelumnya (metode survei)

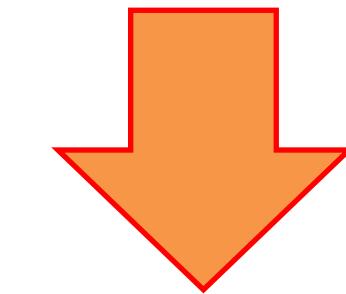
Kelemahan:

- Dalam kondisi normal cenderung memberatkan pengusaha
- Semakin menambah kesenjangan UM antar wilayah karena kenaikannya sama rasa sama rata, padahal kondisi UM pada th 2015 (baseline) senjang antar wilayah

FORMULA PENYESUAIAN UM DARI WAKTU KE WAKTU: PP 36/2021

Pasal 88D

- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum.
- (2) Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai formula perhitungan upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah.



FORMULA PENYESUAIAN UM DARI WAKTU KE WAKTU: PP 36/2021

$$UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + \left[\text{Max}(PE_{(t)}, \text{Inflasi}_{(t)}) \times \left(\frac{\text{Batas atas}_{(t)} - UM_{(t)}}{\text{Batas atas}_{(t)} - \text{Batas bawah}_{(t)}} \right) \times UM_{(t)} \right]$$



Menggunakan angka inflasi dan PE level provinsi (untuk UMP maupun UMK)

Faktor scaling untuk mengurangi kesenjangan UM antar wilayah

Kelebihan:

- Dapat mengurangi kesenjangan UM antar wilayah
- Mendorong pengusaha dan serikat pekerja/buruh untuk mulai fokus ke struktur skala upah guna membahas upah efektif/upah aktual

Kelemahan:

- Bisa menghasilkan % kenaikan di bawah % inflasi
- Formula dianggap rumit oleh stakeholder



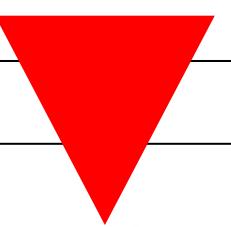
3. AMANAT UU 6/2023 TENTANG UM DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PP 51/2023

UNTUK SIAPA UM DITETAPKAN



Pasal 88E

- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum.



Pasal 24

- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.
- (1a) Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kualifikasi tertentu yang disyaratkan dalam jabatan dapat diberikan Upah lebih besar dari Upah minimum.
- (2) Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala Upah.



Youth workers

AMANAT UU 6/2023 TENTANG PENETAPAN UM

Pasal 88C

- (4) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan Ketenagakerjaan.

Pasal 88D

- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan menggunakan **formula penghitungan Upah minimum.**

(2) **Formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud mempertimbangkan variabel ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.**

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai **formula penghitungan Upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah.**

✓ Mengukur kondisi ekonomi

→ Mengukur kondisi ketenagakerjaan

Variabel indeks tertentu merupakan representasi dari kondisi ketenagakerjaan yang diberi simbol α



PP No 51 Tahun 2023

IMPLEMENTASI FORMULA PENYESUAIAN DALAM PP 51 TH 2023

$$UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + \{(\%Inflasi + \alpha \times \%PE) \times UM_{(t)}\}$$

$$0,10 \leq \alpha \leq 0,30$$

Menggunakan inflasi level provinsi (baik untuk UMP maupun UMK)

Menggunakan pertumbuhan ekonomi Provinsi/kabupaten/kota pada tahun (t-1)

Kelebihan:

- Rumus lebih simple dibanding PP-36/2021
- Win-win solution antara PP-78/2015 dan PP-36/2021
- Dalam kondisi normal akan memberikan kenaikan UM sekecil-kecilnya sebesar inflasi (sehingga daya beli existing UM tidak akan mengalami penurunan)

Kekurangan:

- Tidak mengeliminir kesenjangan UM antar wilayah

PENGECUALIAN FORMULA GUNA MENGELIMINIR KESENJANGAN UM

Formula
Pengecualian

$$UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + (\alpha \times \%PE) \times UM_{(t)}$$

Formula
Generik

$$UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + (%Inflasi + \alpha \times \%PE) \times UM_{(t)}$$

Wilayah2 dengan capaian nilai UM sudah di atas rata-rata kebutuhan biaya hidup di wilayah tersebut, kenaikan UM nya dikendalikan sehingga dari waktu ke waktu kesenjangan UM akan tereliminir

Rata-rata konsumsi Rumah Tangga
Rata-rata banyaknya Anggota Rumah Tangga Bekerja

MENGAPA PERLU PENGECAULIAN FORMULA DALAM PENYESUAIAN UM

- 1) Mereduksi kesenjangan UM antar wilayah, dengan cara mengendalikan laju pertumbuhan UM di beberapa wilayah yang memang nilai UM nya sudah diatas rata-rata biaya hidup di wilayah tersebut. Pengendalian tersebut dilakukan dengan cara menghilangkan komponen inflasi pada formulanya.
- 2) Secara teori, peniadaan komponen inflasi di wilayah2 tsb tidak akan mempengaruhi daya beli UM di wilayah2 tsb karena inflasi hanya akan menaikkan rata2 biaya hidup, sedangkan UM di wilayah2 tsb sudah berada di atas rata2 biaya hidup.
- 3) Pengecualian formula diatas hanya akan terjadi di beberapa wilayah yang dulunya secara historis pernah mengalami kenaikan UM yang fantastis akibat adanya intervensi politik di masa lalu (sebelum kita menggunakan rumus/formula).

MENGAPA PERLU ADA ALFA (SUDUT PANDANG REGULASI)

Pasal 88D

- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula penghitungan Upah minimum.
- (2) Formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variabel **pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.**
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai formula penghitungan Upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Merupakan implementasi/wujud dari variable “Indeks Tertentu” yang diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2023 ttg Cipta Kerja

MENGAPA PERLU ADA ALFA (SUDUT PANDANG TEORI)



Faktor lain yang berkontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi:

- Investasi/modal
- Infrastruktur Pemerintah
- Teknologi
- Managemen

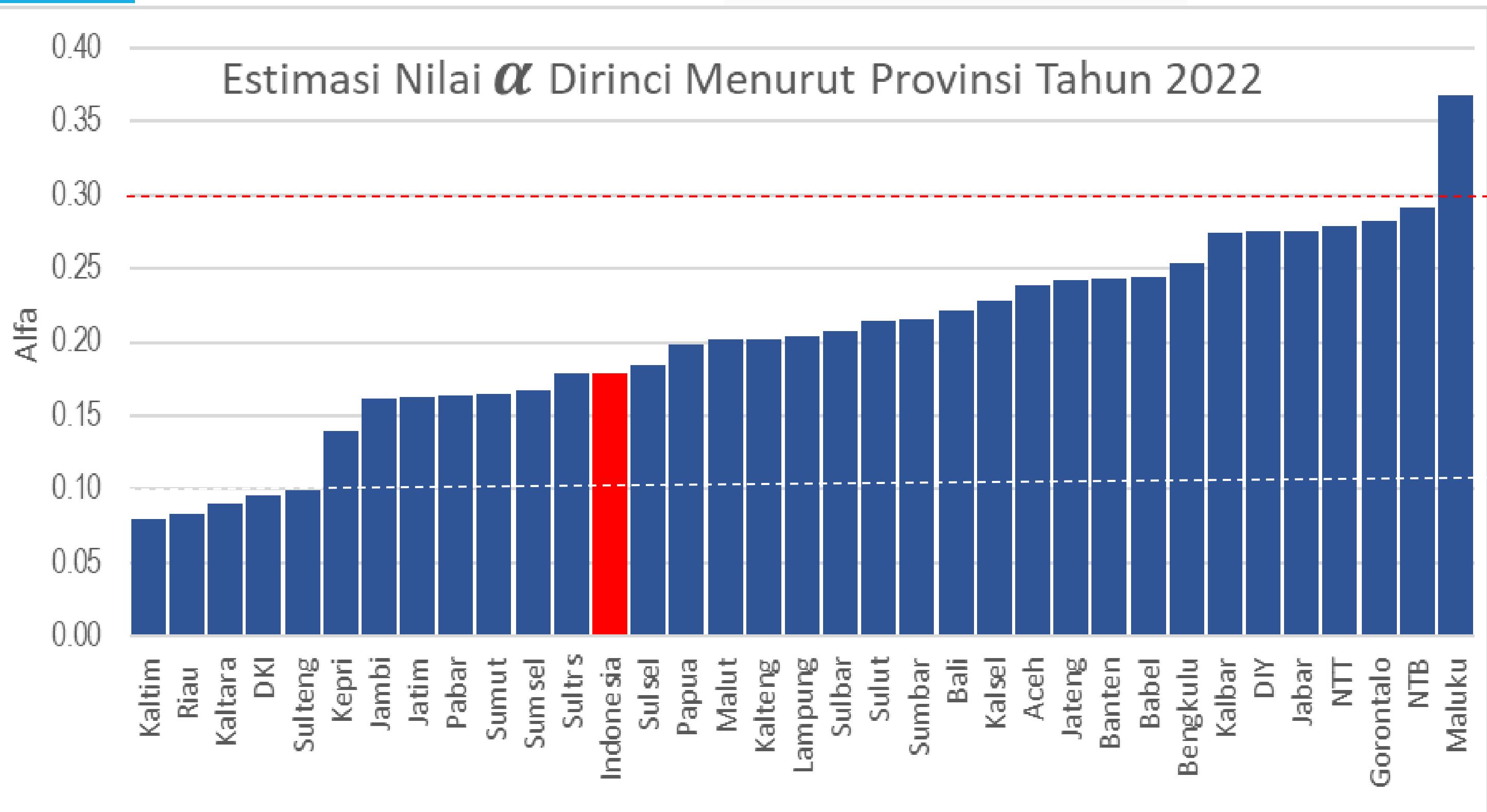
- Dilihat dari sudut pandang **teori ekonomi**, α merupakan representasi dari variabel yang mengukur kontribusi tenaga kerja (*labour share*) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) yang tercipta di suatu wilayah
- Dilihat dari sudut pandang **teori pengupahan**, α merepresentasikan bagian dari “kue pertumbuhan ekonomi” yang dikembalikan kepada tenaga kerja dalam bentuk upah sebagai penghargaan atas produktivitas yang telah dicapai

MENGAPA NILAI α ANTARA 0,10 s/d 0,30

- Meskipun idenya terlihat sederhana, namun mengestimasi nilai α sebagai variable yang merepresentasikan kontribusi tenaga kerja (*labour share*) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) yang tercipta di suatu wilayah tidak mudah karena alasan ketersediaan data
- Cara yang paling umum dalam mengestimasi nilai α adalah sebagai berikut:

$$\hat{\alpha} = \frac{\text{Total Kompensasi Tenaga Kerja Pada Suatu Periode}}{\text{PDRB Pada Periode Yang Sama}}$$

MENGAPA NILAI α ANTARA 0,10 s/d 0,30



Dihitung berdasarkan data Sakernas bulan Februari Tahun 2022 & Data PDRB

Secara umum nilai alfa berada pada kisaran 0,10 sd 0,30

Cenderung stabil dari tahun ke tahun, di beberapa negara cenderung semakin menurun

SIAPA SEBAIKNYA YANG MENENTUKAN NILAI α DAN MENGAPA?

Nilai α sebaiknya ditentukan/disepakati oleh Dewan Pengupahan Provinsi untuk seluruh Kab/Kota yang ada di prov tsb., dengan pertimbangan:

- 1) Dewan Pengupahan Provinsi mengetahui peta permasalahan ketenagakerjaan seluruh Kab/Kota yang ada di provinsinya sehingga bisa melakukan perbandingan antar Kab/Kota
- 2) Memberi peran kepada Depeprov dalam penetapan UM
- 3) Sesuai dengan teori, dalam penetapan UM sebaiknya ada peran “dialog sosial” dengan mempertimbangkan kearifan lokal di masing2 wilayah

INDIKATOR APA YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN DALAM MENETAPKAN NILAI α DAN MENGAPA?

Nilai α sebaiknya ditentukan/disepakati dengan mempertimbangkan variable makro yang relevan dan tersedia datanya pada masing-masing Kab/Kota, meliputi:

1) Rata-rata upah pekerja/buruh.

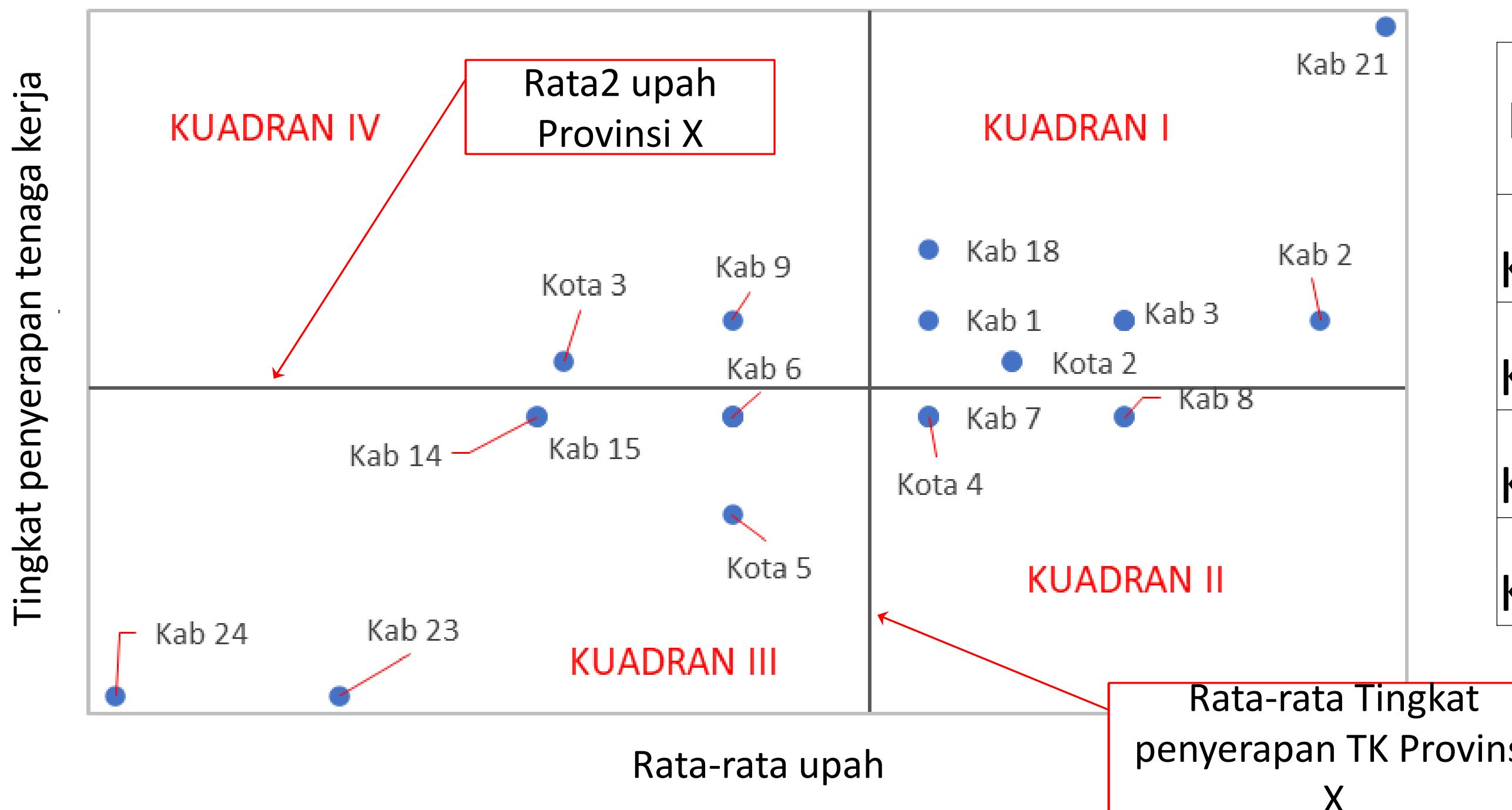
Variabel ini penting karena mencerminkan kemampuan dunia usaha dalam membayar pekerja/buruh. Penetapan UM yang melampaui kemampuan dunia usaha dalam membayar upah akan menyebabkan ketidak patuhan terhadap kebijakan UM yg pada akhirnya akan menyebabkan kebijakan penetapan UM menjadi tidak efektif.

2) Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja (1 – Tingkat Pengangguran Terbuka),

nilai α akan menentukan besar kecilnya persentase kenaikan UM yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja

CONTOH SEDERHANA DALAM MENENTUKAN NILAI α MENGGUNAKAN ANALISIS KUADRAN

CONTOH ANALISIS KUADRAN GUNA MENENTUKAN NILAI ALFA PADA MASING-MASING KAB/KOTA DI PROVINSI X



Kab/Kota yang berada pada:

Kuadran I	$\alpha = 0,25 - 0,30$
Kuadran II	$\alpha = 0,20 - 0,25$
Kuadran III	$\alpha = 0,10 - 0,15$
Kuadran IV	$\alpha = 0,15 - 0,20$

FORMULA UM: PP-51 vs. PP-78 vs. PP-36

PP-78/2015

$$UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + \{(\%Inflasi + \%PE) \times UM_{(t)}\}$$

Pertumbuhan
Ekonomi
nasional

Inflasi nasional

Naik sama rasa sama
rata & tidak ada batas
atas nilai UM

PP-36/2021

$$UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + \left[\text{Max}(PE_{(t)}, Inflasi_{(t)}) \times \left(\frac{\text{Batas atas}_{(t)} - UM_{(t)}}{\text{Batas atas}_{(t)} - \text{Batas bawah}_{(t)}} \right) \times UM_{(t)} \right]$$

PE / Inflasi
provinsi

Naik bervariasi &
Ada batas atas bagi
nilai UM

PP-51/2023

$$UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + \{(\%Inflasi + \alpha \times \%PE) \times UM_{(t)}\}$$

Inflasi
Provinsi

PE Provinsi atau
Kab/Kota

Naik bervariasi & tidak
ada batas atas bagi
nilai UM, namun ada
pengecualian bagi
wilayah2 yg nilai UM
nya sdh diatas rata-rata
biaya hidup di wilayah
tersebut

TERIMA KASIH



... Sistem sebaik apapun, tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya itikad baik dari para pemangku kepentingannya ...